



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
BADUNG



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

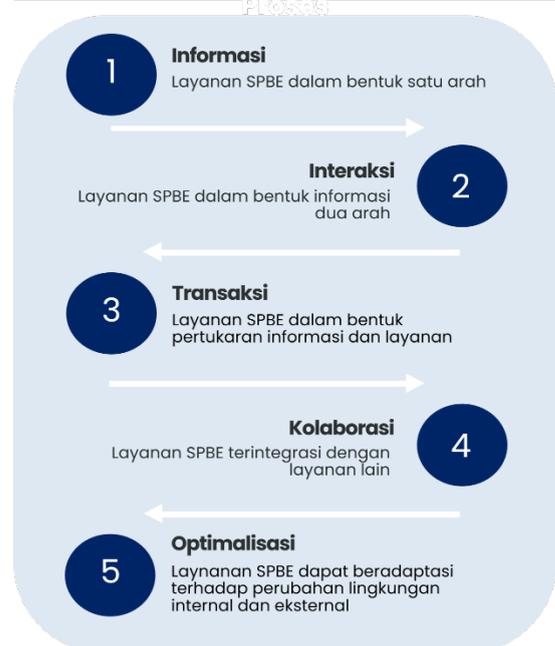
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



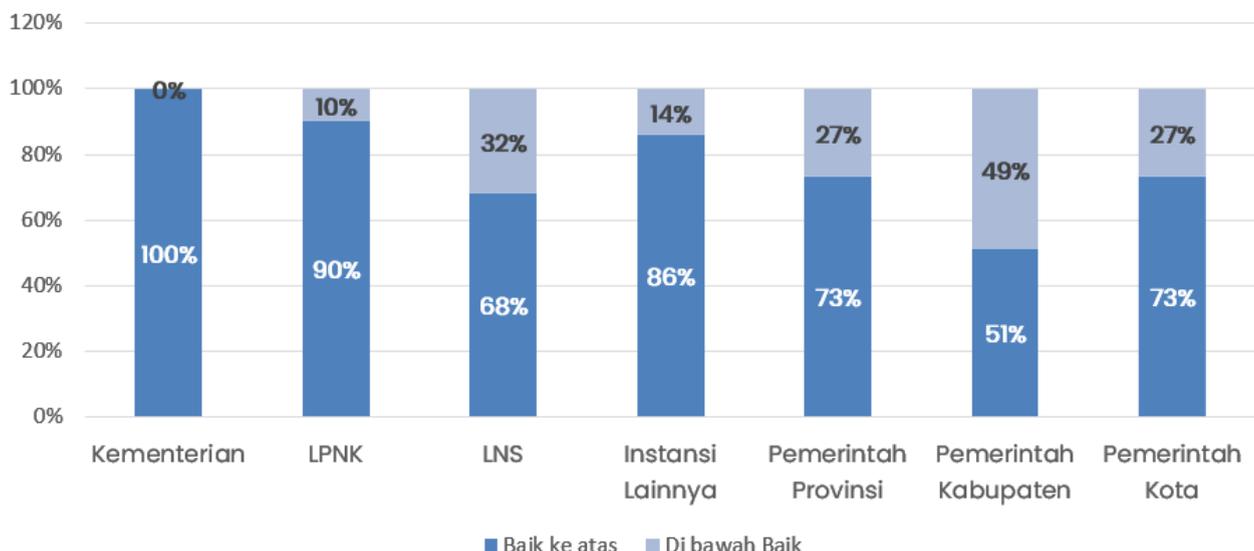
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

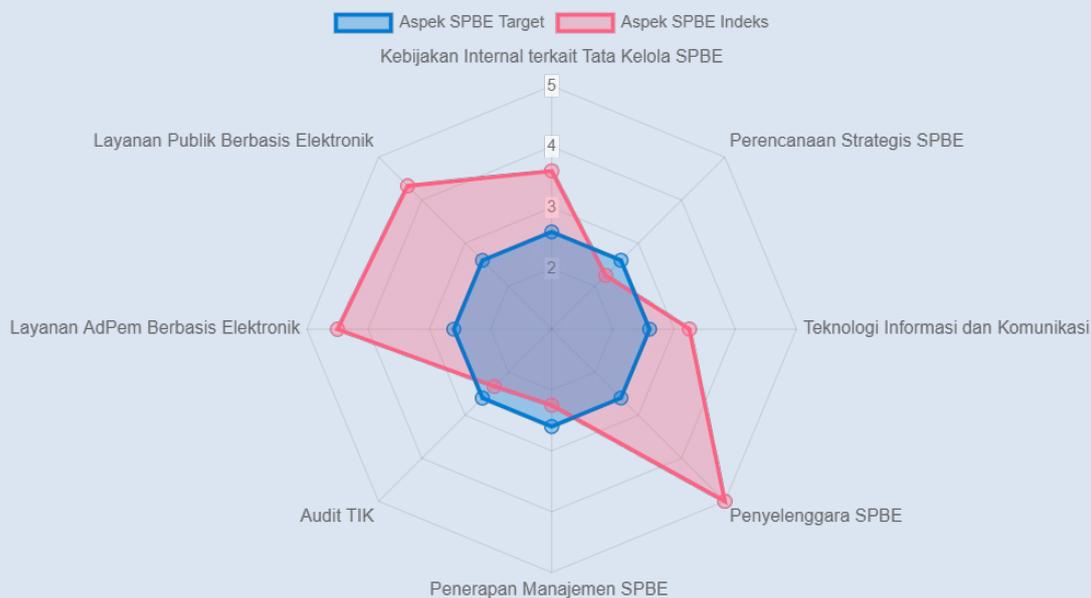
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,66
Domain Kebijakan SPBE	3,60
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,60
Domain Tata Kelola SPBE	3,20
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	5,00
Domain Manajemen SPBE	2,27
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,25
<i>Audit TIK</i>	2,33
Domain Layanan SPBE	4,43
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,50
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara Keseluruhan aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE pada Kabupaten Badung terpenuhi, hal ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang memuat kebijakan internal Arsitektur SPBE, kebijakan Peta rencana, kebijakan manajemen data, pembangunan aplikasi dll yang mencakup aspek tata tata kelola SPBE

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE ini terlihat dukungan dan komitmen pimpinan daerah dalam penerapan SPBE sudah sangat kuat hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur aspek2 tata kelola SPBE. Tujuh puluh persen indikator dalam aspek ini sudah sangat bagus.
- **Kelemahan**
Namun demikian Pemerintah Kabupaten Badung masih sangat perlu untuk ditingkatkan dalam hal kebijakan internal Peta Rencana SPBE, Manajemen Data dan tim koodinasi SPBE perlu untuk dikuatkan lagi

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemerintah Kabupaten Badung sudah terpenuhi, hal ini ditunjukkan dengan adanya Master plan TIK, RJPMD dan Masterplan smart city

- **Kekuatan**
Pemerintah Kabupaten Badung, pada aspek Perencanaan Strategis SPBE dari 4 indikator yang ada, belum menunjukkan kekuatan yang dapat tunjukan. walaupun demikian indikator Rencana dan Anggaran SPBE sudah menuju sebagai indikator yang lebih kuat dibanding yang lain.
- **Kelemahan**
Secara umum aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemerintah kabupaten Badung masih lebih lemah pada hampir semua indikator, kecuali indikator Rencana dan Anggaran SPBE

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara Keseluruhan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Badung sudah terpenuhi, hal ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Mekanisme dan prosedur Pembangunan aplikasi.

- **Kekuatan**
Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Badung secara umum sudah kuat, hal ini ditunjukkan dengan 3 dari 4 indikator pada aspek ini sudah kuat, dengan dukungan Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi. hanya 1 indikator yang masih perlu untuk ditingkatkan.
- **Kelemahan**
Walaupun demikian, satu indikator pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung masih sangat perlu untuk mendapat perhatian untuk ditingkatkan, yaitu indikator Layanan Pusat Data

D. Penyelenggara SPBE

Keseluruhan aspek Penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kabupaten Badung sudah terpenuhi, hal ini ditunjukkan dengan adanya SK tim pelaksana SPBE dan Smart City, Progrma kerja dan rencana kerja SPBE dan dokumen lain.

- **Kekuatan**
Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kabupaten Badung sudah sangat bagus sehingga ini menjadi aspek yang sangat kuat
- **Kelemahan**
Walapun demikian dalam aspek Penyelenggara SPBE ini Pemerintah Kabupaten Badung tetap perlu melakukan review dan perbaikan untuk menjaga agar tetap kuat

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara Keseluruhan aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemerintah Kabupaten Badung sudah terpenuhi dengan adanya berbagai dokumen yang menjadi indikator dalam penerapan manajemen SPBE, antara

lain : Peraturan Bupati Badung nomor 35 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah , SOP TIK data center, Manajemen identifikasi resiko dll.

- Kekuatan
Dalam aspek Penerapan Manajemen SPBE ini pemerintah Kabupaten Badung ada indikator yang sudah bagus yaitu Manajemen Keamanan Informasi, hal ini menjadi kekuatan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE. Namun secara umum aspek Penerapan Manajemen SPBE masih sangat perlu untuk ditingkatkan.
- Kelemahan
Secara umum aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Kabupaten Badung masih sangat perlu ditingkatkan, dari 8 indikator pada aspek ini hanya 1 indikator yang dapat dikatakan bagus. sehingga secara umum masih sangat perlu ditingkatkan.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan pemenuhan pada aspek Audit TIK di Pemerintah Kabupaten Badung terpenuhi dengan adanya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, Laporan hasil audit Infrastruktur SPL, Laporan hasil audit Jaringan Intra Pemerintah

- Kekuatan
Secara umum aspek Audit TIK di Pemerintah Kabupaten Badung dalam rerata, dari tiga indikator yang ada dalam aspek ini, belum menunjukkan ada kekuatan maupun kelemahan,
- Kelemahan
namun begitu berdasarkan data tahun sebelumnya belum menunjukkan ada peningkatan sehingga ini juga yang perlu mendapat perhatian

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kab Badung telah terpenuhi dengan adanya Panduan penggunaan sistem, implemntasi dan sosialisasi penggunaan sistem, panduan teknis fungsi sistem

- Kekuatan
Keseluruhan indikator pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di PemKab Badung sudah bagus, Sepuluh ndikator yang ada menunjukkan kekuatan dari penerapan SPBE di PemKab Badung. Aspek ini juga merupakan aspek yang paling bagus dibandingkan dengan aspek lain.
- Kelemahan
Walaupun demikian untuk menjaga kekuatan dan bagusnya aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, PemKab Badung tetap perlu melakukan reuiu dan evaluasi secara berkelanjutan

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Seluruh indikator pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dalam penerapannya oleh PemKab Badung sudah terpenuhi dengan Layanan Aplikasi Pengaduan , Aplikasi Badung satu data, penambahan fitur JDIH, Sistem Ehibah

- Kekuatan
Penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik pada PemKab Badung secara keseluruhan sudah bagus dgn adanya berbagai inovasi dari sistem layanan yang diterapkan dalam mendukung penerapan SPBE, hal ini menjadi kekuatan tersendiri.
- Kelemahan
Walaupun begitu, untuk tetap memberikan layanan yang lebih baik, tetap harus selalu dilakukan reuiu dan evaluasi serta perbaikan secara periodik

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Badung. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap penerapan SPBE di PemKab Badung, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE,

sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang telah diterapkan oleh di Pemerintah Kabupaten Badung antara lain pada aspek Penyelenggara SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan tersebut ditunjukkan dengan adanya Tingkat Kematangan yang sangat baik pada : Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah, Kolaborasi Penerapan SPBE, Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Data Terbuka, Layanan Kinerja Pegawai, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Publik Sektor 1

Namun disisi lain penerapan SPBE di PemKab Badung masih ada beberapa kelemahan yang perlu untuk ditingkatkan antara lain pada Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan

Secara umum kami sangat mengapresiasi kinerja team SPBE yang nampak sudah sangat abgus dalam koordinasinya, hany perlu meningkatkan dalam beberapa aspek terutama aspek Perencanaan Strategis SPBE dan aspek Penerapan Manajemen SPBE. Walaupun tanpa menghilangkanan reuiu, evaluasi dan tindak lanjut untuk aspek lain.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	4
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4